

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)**

Sri Mulya Lestari dan Yayuk Eko Wahyuningsih

Universitas Teuku Umar, Indonesia

E-mail: srimulyalestari06@gmail.com dan yayukew@utu.ac.id

Diterima:

28 September
2021

Direvisi:

12 Oktober 2021

Disetujui:

15 Oktober 2021

Abstrak

Peran serta keterlibatan masyarakat untuk pembangunan desa itu sangat diperlukan karena ini dapat dijadikan sebagai suatu kegiatan kerjasama antar pemerintah desa dengan masyarakat. Oleh karena itu Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana kerja pemerintah. peneliti ingin memahami secara mendalam sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Penelitian ini dilakukan di desa Pasi Pinang Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat, adapun data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari jawaban responden hasil kuisisioner, penelitian ini sendiri menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan Case Study, penelitian kualitatif ini melibatkan upaya pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan kuisisioner kepada pemerintah desa dan juga masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan di desa Pasi Pinang sudah sesuai dan dilakukan secara aktif akan tetapi tidak mengikut sertakan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan, masyarakat hanya berpartisipasi dalam bermusyawarah untuk rencana pembangunan.

Kata kunci: *Partisipasi, Masyarakat, Penyusunan rencana kerja*

Abstract

The participation of the community for village development is very necessary because it can be used as a collaborative activity between the village government and the community. Therefore, this study aims to determine the level of community participation in the preparation of government work plans. Researchers want to understand in depth the extent of community participation in village development. This research was conducted in the village of Pasi Pinang, Meurebo District, West Aceh Regency, while the data used is primary data sourced from the respondents' answers to the questionnaire results, this research itself uses a qualitative method with a case study approach, this qualitative research involves data collection efforts conducted by interview. and questionnaires to the village government and the community. The results showed that the development planning process in Pasi Pinang village was appropriate and carried out actively but did not include community participation in planning preparation, the community only participated in deliberation for development plans.

Keywords: Participation, Community, Preparation of work

Pendahuluan

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan kemampuan desa dalam mengelola sumber daya ekonomi secara efisien agar kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat. pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup masalah lebih luas (Melis, Muthalib, & Apoda, 2016).

Menurut Wulandari (2015) dalam Didik (2021) pelaksanaan pembangunan desa harus melibatkan peran aktif masyarakat, perangkat desa, lembaga-lembaga desa, lembaga di tingkat kecamatan, lembaga ditingkat kabupaten/ kota dan lain-lain (Melis et al., 2016). Perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, monitoring, serta perkembangan pembangunan desa perlu melibatkan peran aktif masyarakat (Wulansari, 2015).

Masyarakat sebagai sasaran harus terlibat dalam pelaksanaan pembangunan desa, karena masyarakat lebih mengetahui segala hal yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah kesejahteraan tanpa membawa masyarakat dalam proses pembangunan maka pembangunan tidak akan bisa dan tidak menemui saran yang dicapai karena kebijakan yang dikeluarkan atasan sangat jauh dari ambisi, kepentingan, dan kebutuhan rakyat (Probosiwi, 2015). selain itu hilangnya partisipasi mengakibatkan banyak terjadi penyangkalan amanat rakyat yang berakhir pada proses penyalahgunaan kekuasaan.

Partisipasi masyarakat dapat dilihat dalam kegiatan musyawarah yang ada diadakan didesa. Salah satu musyawarah perencanaan pembangunan yaitu musrenbang yang menghasilkan dokumen RKP Desa (Tahulending, Kaunang, & Sumampouw, 2018). Pembuatan Rencana Kerja pemerintah Desa (RKPDes) diawali dengan penggalian gagasan yang kemudian dimasukkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) (Handoko, 2019). Penyusunan RPJM desa disesuaikan dengan pasal 7 ayat (3), sedangkan penyusunan RKP desa disesuaikan dengan pasal 30 ayat (2) dalam peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 144 Tahun 2014. RPJMDes dan RKPDes merupakan dasar dalam pembangunan desa dengan tujuan melakukan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Djantonius Tamo, 2016).

Peraturan bupati Aceh Barat nomor 22 tahun 2015 tentang rencana kerja pembangunan daerah kabupaten Aceh Barat bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan qanun Kabupaten Aceh Barat nomor 2 tahun 2013 tentang rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Aceh Barat tahun 2012-2017, perlu disusun rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Aceh Barat bahwa rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Aceh Barat memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkeeseimbangan.

Mengingat RKPDes Kabupaten Aceh Barat memuat tolak ukur kinerja kepala daerah dalam merealisasikan program sesuai dengan visi misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu dilakukannya kegiatan musrenbang (Januarsyah, 2013).

Musrebang RKPD Kabupaten Aceh Barat dimulai dari tahapan musrebang tingkat Gampong (desa) melalui pendekatan bottom-up. Musrebang tingkat Gampong dilaksanakan dengan waktu yang telah ditentukan yang akan menghasilkan usulan prioritas skala Gampong. Masing-masing Gampong membawa 10 usulan atau lebih, yang selanjutnya akan diambil 3 usulan prioritas untuk setiap progra kerja (infrastruktur, ekonomi, dan sosial) yang akan dibawa ke musrebang tingkat kecamatan (Paselle, 2017). Setelah musrebang kecamatan, maka dilaksanakan forum SKPK yang dilaksanakan di BAPPEDA Kabupaten Aceh Barat.

Upaya mewujudkan suatu pemerintah desa/Gampong yang profesional, bersih, partisipasif dan inovatif sesuai dengan amana UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, undang-undang nomor 17 tahun 2003, undang-undang 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang alokasi anggaran desa yang bersumber dari APBN dan peraturan menteri dalam negeri nomor 66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa, maka pemerintah Gampong mewajibkan menyusun rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG). Rencana kerja pemerintah Gampong merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah Gampong yang dalam penyusunannya membutuhkan koordinasi dan petunjuk dari instansi pemerintah serta peran serta seluruh elemen masyarakat gapong melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

Desa Pasir Pinang terletak pada bagian pesisir barat dari Provinsi Aceh, desa Pasir Pinang merupakan salah satu Gampong yang ada dikecamatan meureubo Kabupaten Aceh Barat, Desa Pasi Pinang terletak dengan luas wilayah 76 hektar yang terdiri dari Tanah sawah 40 Ha dan tanah bukan sawah 36 Ha, dengan batas wilayah sbb; Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Ujong Tanjong Kec. Meureubo Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Ujong Drien Kec. Meureubo Sebelah selatan berbatasan dengan samudra hindia Kec. Meureubo Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Darat Kec. Johan pahlawan Secara giografis terletak 110' 48' 55, 12" BT dan terletak di 7' 02' 27,52" LS (Ali, Saputri, & Mursawal, 2020). Secara topografi Gampong Pasi Pinang termasuk dalam katogeri daerah daratan rendah dengan ketinggian 25 meter dari permukaan laut (mdpl) (Achmad, Fazriyas, & Pratiwi, 2018).

Sesuai observasi awal di desa Pasi Pinang keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi dalam rencana kerja pemerintah desa tidak ikut dilibatkan hanya aparatur desa yang ikut andil dalam proses perencanaan, oleh karena itu pemerintah desa dituntut untuk melaksanakan setiap kegiatan dan program yang telah ditetapkan bersama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) secara maksimal agar dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan (Pratama, Da Pratama, Yuliatin, & Lestiyani, 2019). Kabupaten Aceh Barat memiliki dua puluh enam desa yang merupakan bagian dari kecamatan Meurebo, dan diantara banyaknya desa tersebut saya mengambil Desa Pasi Pinang sebagai tempat penelitian saya, dapat kita lihat bagaimana partisipasi masyarakat yang terjadi di Desa Pasi Pinang tersebut dikatakan sebagai daerah yang baik dengan masyarakat yang cukup akan pengetahuan tentang pembangunan, dengan begitu proses pembangunan yang melibatkan masyarakat nantinya bermanfaat dan nikmat oleh semua masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini mengenai partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa (rkpdes) (studi kasus desa Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan Case Study yaitu partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa dan penelitian ini juga menggunakan studi Kasus dengan fokus penelitian pada lingkup mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses Rencana Kerja Pemerintah Desa proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, kuisisioner, kepada pemerintah desa dan juga elemen masyarakat. peneliti menggunakan metode Case Study karena ingin memahami secara mendalam bagaimana partisipasi tersebut berlangsung terutama dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Penelitian ini dilakukan didesa Pasi Pinang di kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2021 hingga Agustus 2021.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian sebelumnya terkait dengan partisipasi masyarakat oleh Arifandi Setya Nugroho yang berjudul Partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa perspektif Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJM desa Temuwulan tahun 2014-2019 perspektif Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf. Jika dikontekstualisasikan menggunakan teori partisipasi maka pelibatan dan keterlibatan masyarakat belum terpenuhi karna fakta nya masih ada masyarakat yang belum dilibatkan dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa, serta keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa masih kurang mengerti sehingga kurang aktif dalam berkontribusi.

Herman dalam penelitian berjudul tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa ulidang kecamatan tammerodo kabupaten majene menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat yang rendah karena sebagian besar masyarakat kurang aktif dalam menghadiri pertemuan-pertemuan, selain itu masyarakat kurang aktif dalam pembahasan perencanaan pembangunan desa, selanjutnya masyarakat cukup aktif dalam pemberian informasi dan pemberian bantuan pemikiran yang dipergunakan dalam pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa di desa ulidang kecamatan tamero'do.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut diatas, partisipasi masyarakat dalam rencana kerja pemerintah desa masih sangat minim, tidak jauh berbeda dengan penelitian ini dimana pasrtisipasi masyarakat juga masih rendah karena masyarakat tidak dilibatkan dan tidak diikutsertakan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa, hanya perangkat desa dan sebagian tokoh masyarakat yang melakukan penyusunan rencana kerja pemerintah.

RKPDes merupakan rencana kerja pemerintah desa yang dibuat berdasarkan penjabaran yang dibutuhkan, sebelum dilakukannya musyawarah desa terlebih dahulu diselenggarakannya musyawarah dusun sehingga program-program yang masyarakat inginkan bisa disampaikan pada saat musyawarah desa, sistem ini dilakukan agar pemerintah desa lebih transparan kepada masyarakat (Maftuhah, Rahmawati, & Waseh, 2019). Musyawarah desa dilaksanakan oleh panitia penyelenggara yang dipertanggung jawabkan oleh pemerintah desa. Proses dalam musyawarah Desa melibatkan antara lain :

- a. Tokoh masyarakat disetiap dusun, perwakilan masing-masing dusun merupakan masyarakat yang memang sudah dipercayai oleh masyarakat sebagai perwakilan dalam musyawarah desa yang akan dilaksanakan.

- b. Mengundang pihak kecamatan/kantor camat dalam proses pencatatan program yang tidak dapat dilaksanakan didesa.
- c. Perwakilan pemerintah desa (aparatur desa) juga turut andil dalam menetapkan program yang diprioritaskan, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang nantinya akan menghasilkan dokumen rencana kerja pemerintah desa rkpdes.
- d. Mengundang elemen masyarakat memberi peluang untuk ikut mengusulkan program prioritas desa. Dalam proses musyawarah rkpdes. Pemerintah desa beserta masyarakat dan juga dari tuha peut memilih program mana yang akan diprioritaskan dalam pembangunan satu tahun.

Hasil dari semua program yang akan menjadi prioritas didesa, dengan program-program yang tentunya akan diprioritaskan didesa Pasi Pinang dalam anggaran Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Program RKP Desa Pasi Pinang Tahun 2022.

| Bidang Program | Pogram |
|----------------------------|--|
| Penyelenggaraan Pemerintah | 1. Rehap rumah tidak layak huni 2. Rehap posko penanganan covid |
| Pembangunan | 1. Rabat beton 2. Jembatan untuk petani 3. Sumur bor |

Sumber : data primer, diolah 2021

Partisipasi masyarakat didesa Pasi Pinang dalam melaksanakan musyawarah yang membahas mengenai rencana kerja pemerintah desa ikut hadir dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah yang dilaksanakan dikantor desa, selain itu bentuk kehadiran masyarakat dalam berpartisipasi masyarakat didesa Pasi Pinang juga ikut terlibat aktif selama berlangsungnya kegiatan rapat dan masyarakat ikut memberikan usulan-usulan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, sebelumnya dilaksanakannya musyawarah desa, masyarakat melakukan musyawarah antar dusun dengan begitu kepala dusun akan meminta usulan-usulan program dari masyarakat yang memang kiranya dibutuhkan oleh dusun tersebut. Didesa pasi pinang sendiri terdiri dari dua dusun yaitu dusun Keramat dan dusun PKK.

Masyarakat diundang dalam kegiatan musyawarah desa untuk ikut dalam memberikan usulan-usulan dalam proses pembangunan desa, kemudian dari musyawarah tersebut dan pemerintah desa saling bertukar informasi antara satu sama lain, ini biasa disebut sebagai *feed-forward information* and *feedback information* yang berarti umpan balik informasi dari pemerintah ke masyarakat desa (Agustin, 2016). Kegiatan musyawarah desa dilaksanakan dalam forum musyawarah selama kegiatan musyawarah berlangsung pihak pemerintah desa mengundang masyarakat untuk ikut serta dalam mencari tau dan menggali informasi sedalam-dalamnya dari masyarakat yang memang dibutuhkan (Ikhomah & Mahsun, 2016).

Berdasarkan bentuk berpartisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Rencana kerja pemerintah desa, maka peran masyarakat sebagai pemberi usulan-usulan, ide dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat maka dari itu peran masyarakat dalam perencanaan melalui diskusi untuk saling melengkapi informasi dan menyamakan pendapat tentang kebijakan yang akan diputuskan. Peran masyarakat harus ditingkatkan lagi dalam pembangunan dan hendaknya masyarakat tidak dipandang sebagai objek semata, tetapi peran masyarakat sangat penting untuk dilibatkan sebagai pelaku aktif dalam perencanaan pembangunan (Wungow, 2016).

Antusias masyarakat dalam mengikuti musyawarah desa mempunyai kemauan yang tinggi, hal itu dapat dibuktikan dengan hasil musyawarah yang telah dilakukan antara pemerintah desa Pasi Pinang dengan masyarakat bisa dikatakan segala kegiatan-kegiatan memang kebutuhan dari masyarakat untuk jangka waktu yang cukup panjang. Hasil penelitian yang sudah penulis lakukan mengenai partisipasi masyarakat dalam rencana kerja pemerintah desa antara lain yaitu:

Tabel 2. Hasil dari semua program yang sudah saya observasi didesa pasi pinang ada lima program yang diprioritaskan oleh desa.

| No | Katagori | Jumlah | Populasi (n) | Persentase % |
|-------|------------------------------|--------|--------------|--------------|
| 1 | Rehap rumah tidak layak huni | 3 | 20 | 15 |
| 2 | Rehap posko covid-19 | 0 | 20 | 0 |
| 3 | Rabat beton | 0 | 20 | 0 |
| 4 | Jembatan untuk petani | 0 | 20 | 0 |
| 5 | Sumur bor | 17 | 20 | 85 |
| Total | | 20 | 20 | 100 |

Sumber : Hasil penelitian (juli 2021)

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari lima program yang ada di Pasi Pinang, sumur bor memiliki persentase (85%) ini merupakan program yang paling di utamakan oleh masyarakat dan rehap rumah tidak layak huni memiliki persentase sebanyak (15%) dengan begitu program yang seterusnya akan di laksanakan terlebih dulu setelah program sumur bor.

Tabel 3. Program rehap rumah tidak layak huni

| No | Katagori | Populasi (n) | Persentase % |
|-------|--------------------|--------------|--------------|
| 1 | Sangat tidak perlu | 0 | 0 |
| 2 | Tidak perlu | 0 | 0 |
| 3 | Cukup | 4 | 20 |
| 4 | Perlu | 9 | 45 |
| 5 | Sangat perlu | 7 | 35 |
| Total | | 20 | 100 |

Sumber : Hasil penelitian (juli 2021)

Tabel 4. Perlukah didirikannya posko covid-19 dan melakukan perehapan didesa pasi pinang.

| No | Katagori | Populasi (n) | Persentase % |
|-------|--------------------|--------------|--------------|
| 1 | Sangat Tidak Perlu | 0 | 0 |
| 2 | Tidak Perlu | 0 | 0 |
| 3 | Cukup | 2 | 10 |
| 4 | Perlu | 11 | 55 |
| 5 | Sangat Perlu | 7 | 35 |
| Total | | 20 | 100 |

Sumber : Hasil penelitian (juli 2021)

Tabel 5. Program rabat beton apakah perlu di laksanakan.

| No | Katagori | Populasi (n) | Persentase % |
|----|--------------------|--------------|--------------|
| 1 | Sangat tidak perlu | 0 | 0 |
| 2 | Tidak perlu | 1 | 5 |

| | | | |
|-------|--------------|----|-----|
| 3 | Cukup | 3 | 15 |
| 4 | Perlu | 14 | 70 |
| 5 | Sangat perlu | 2 | 10 |
| Total | | 20 | 100 |

Sumber : Hasil penelitian (juli 2021)

Tabel 6. Program jembatan untuk para petani didesa pasi pinang.

| No | Katagori | Populasi (n) | Persentase % |
|-------|--------------------|--------------|--------------|
| 1 | Sangat Tidak Perlu | 0 | 0 |
| 2 | Tidak Perlu | 2 | 10 |
| 3 | Cukup | 6 | 30 |
| 4 | Perlu | 7 | 35 |
| 5 | Sangat Perlu | 5 | 25 |
| Total | | 20 | 100 |

Sumber : Hasil penelitian (juli 2021).

Tabel 7. Program sumur bor

| No | Katagori | Populasi (n) | Persentase % |
|-------|--------------------|--------------|--------------|
| 1 | Sangat Tidak Perlu | 0 | 0 |
| 2 | Tidak Perlu | 0 | 0 |
| 3 | Cukup | 0 | 0 |
| 4 | Perlu | 3 | 15 |
| 5 | Sangat Perlu | 17 | 85 |
| Total | | 20 | 100 |

Sumber : Hasil penelitian (juli 2021).

Kesimpulan tabel diatas menjelaskan bahwa program sumur bor sangat di perlukan untuk di utamakan terlebih dahulu bagi masyarakat didesa Pasi Pinang dari program yang lainnya, untuk kebutuhan mendesak karena didesa Pasi Pinang masih kekurangan air bersih untuk kelangsungan kehidupan masyarakat setempat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan maka dapat disimpulkan musyawarah rencana pembangunan desa lebih memilih program yang telah diprioritaskan selama satu tahun dan rencana kerja pemerintah desa didesa Pasi Pinang yakni memiliki dua bidang dan lima program, pihak yang terlibat antara lain adalah pemerintah desa Pasi Pinang dan semua elemen masyarakat yang sudah terlibat. Bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa antara lain ikut menghadiri kegiatan musyawarah, lalu menyampaikan usulan-usulan, ide, dan pendapat sebagai jalan untuk mengambil keputusan. Peran masyarakat ialah sebagai pihak yang secara langsung memberi gagasan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan partisipasi masyarakat mempunyai kemauan dan kesempatan berpartisipasi yang tinggi dan hasil kuisioner yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa rata-rata jawaban masyarakat program sumur bor agar dapat didahulukan.

Bibliografi

- Achmad, Eva, Fazriyas, Fazriyas, & Pratiwi, Hutari Ladjusa. (2018). Arahan Tata Ruang Pengelolaan Hutan Desa Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *Jurnal Silva Tropika*, 2(2), 34–46.
- Agustin, Merry. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir

- Ali, M., Saputri, Mimie, & Mursawal, Asri. (2020). *Wajah Pesisir Aceh*. Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Djantonius Tamo, Ama. (2016). *Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desadi Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta*.
- Handoko, Nyodi. (2019). *Formulasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (Studi Di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2019)*. Jember: Universitas Muhammadiyah Jember.
- Ikhomah, Etik Isti, & Mahsun, Mohammad. (2016). *Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015*. Yogyakarta: STIE Widya Wiwaha.
- Januarsyah, Rizky. (2013). *Analisis Proses Penerapan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Instansi Pemerintah (Studi Kasus Sekretariat Keuangan Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah)*. Jakarta Selatan: STIE Indonesia Banking School.
- Maftuhah, Maftuhah, Rahmawati, Rahmawati, & Waseh, Hasuri. (2019). *Manajemen Dana Desa Di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Tahun Anggaran 2017*. Tangerang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Melis, Melis, Muthalib, Abd Azis, & Apoda, Apoda. (2016). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Wawolesea Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara). *Jurnal Ekonomi Uho*, 1(1).
- Paselle, Enos. (2017). Perencanaan Pembangunan Partisipatif: Studi Tentang Efektivitas Musrenbang Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara. *Jurnal Paradigma (JP)*, 2(1), 10–25.
- Pratama, Anda, Da Pratama, S. I. P., Yuliatin, Yuliatin, & Lestiyani, Tri Endah Karya. (2019). *Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Di Desa Tuk Jimun Kecamatan Kemuning Kabupaten Idragiri Hilir*. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin.
- Probosiwi, Ratih. (2015). Perempuan Dan Perannya Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Women and Its Role on Social Welfare Development). *Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 3(1).
- Tahulending, Ricardo, Kaunang, Markus, & Sumampouw, Ismail. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musrembang) Di Desa Sonsilo Kecamatan Likupang Barat. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Wulansari, Tri Anjar. (2015). Peran Masyarakat Desa Landungsari Kabupaten Malang Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2013-2019. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(3).
- Wungow, Chenny Engglyn. (2016). Peran Tokoh Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa (Studi di Desa Lolombulan Makasili Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 1164.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).